

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Fajar, Mukti dan Ahmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009.
- Hardani, et. al. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020.
- Machmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Manan, Bagir dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: Penerbit Alumni, 2017.
- Marzuki, Piter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Prayoga, Andhika. *Hukum Pembubaran, Likuidasi, dan Pengakhiran Status Badan Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.
- Sari, Annita, et. al. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2022.
- Sirait, Justine T. *Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Jakarta, PT Grasindo, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: Penerbit Universitas Indonesia, 2015.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Sriwidodo, Joko dan M.S. Tumanggor. *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2024.

Sudiarto. *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*. Mataram: Mataram University Press, 2022.

Sumardjono, Maria S.W. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.

Widiastiani, Nindry Sulistya. *Pengantar Hukum Perburuhan: Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2022.

Yuhelson. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.

ARTIKEL JURNAL

Afifah, Fatma dan Sri Warjiyanti. "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* Vol. 1 No. 2 (September 2024).

Halilah, Siti dan Muhammad Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Jurnal Hukum Tata Negara Siyasah* Vol. 4 No. II (Desember, 2021).

Luqman Fajri, Muhammad Wildan Candra Malo, Naufal Rafif Kusuma Putra, dan Ferry Irawan. "Kedudukan Hak Mendahului Utang Pajak, Bank, dan Upah Buruh." *Educoretax* Vol. 2 No. 1 (2022).

Izzulhaq, Muhammad Hafizh dan Iwan Joesoef. "Hak Upah Pekerja atas Perusahaan Pailit: Disharmonisasi Peraturan Undang-Undang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 12 No. 1 (2023).

Melisa, et. al. "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 5, No. 1 (Januari-Juni 2023).

Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 1993.

Ni Putu Trisna Dewi, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Nyoman Utama. "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Hal Perusahaan Mengalami Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol 3 No. 1 (Maret 2022).

Ramadhani, Wulandari Rima. "Kreditur Separatis vs Upah Buruh: Suatu Kajian dalam Hukum Kepailitan." *Jurnal Media Iuris Universitas Airlangga* Vol. 4 No. 1 (Februari 2022).

Wardani, Annisa dan Nofa Delasa. "Keadilan Hukum Indonesia: Thomas Aquinas mengenai Keadilan Hukum dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Pluralis." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Vol. 1 No. 1 (Januari 2023).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740).

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702).

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647)

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648).

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190).

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 Januari 2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Pasal 81 angka 4, Pasal 81 angka 12, Pasal 81 angka 13 Pasal 57, Pasal 81 angka 15, Pasal 81 angka 16, Pasal 81 angka 17, Pasal 81 angka 18, Pasal 81 angka 19, Pasal 81 angka 20, Pasal 81 angka 25, Pasal 81 angka 27, Pasal 81 angka 28, Pasal 81 angka 29, Pasal 81 angka 30, Pasal 81 angka 31, Pasal 81 angka 32, Pasal 81 angka 33, Pasal 81 angka 35, Pasal 81 angka 36, Pasal 81 angka 38, Pasal 81 angka 39, Pasal 81 angka 40, Pasal 81 angka 41, Pasal 81 angka 45, Pasal 81 angka 47, Pasal 81 angka 49, Pasal 81 angka 53, Pasal 81 angka 54, Pasal 81 angka 55, Pasal 81 angka 56, Pasal 81 angka 57, Pasal 81 angka 58, Pasal 81 angka 59, Pasal 81 angka 61, dan Pasal 81 angka 64 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 31 Oktober 2024.